

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DANA DESA  
BAWANG DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Rafly Rahman Alfadila

NPP. 32.0295

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [raflyrahmanalfadila14@gmail.com](mailto:raflyrahmanalfadila14@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Rosmery Elsy, SH., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This study is motivated by the strategic importance of village infrastructure development in reducing inequality and promoting rural prosperity. However, challenges such as limited effectiveness, low community participation, and issues in accountability of Village Fund utilization still persist. **Purpose:** This study aims to evaluate the policy of village infrastructure development through the Village Fund in an effort to improve community welfare in Bawang Village, Punduh Pidada Sub-district, Pesawaran Regency, Lampung Province. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. William N. Dunn's public policy evaluation theory is used as an analytical framework, covering dimensions such as effectiveness, efficiency, adequacy, appropriateness, responsiveness, and equity. **Result:** The findings indicate that although infrastructure development policies using Village Funds have been implemented in accordance with regulations, there are still challenges including limited human resource capacity, low community participation in planning, and lack of technical supervision and training for village officials. **Conclusion:** Village infrastructure development through Village Funds has shown positive outcomes in regulation compliance and welfare support, yet improvements are needed. The study recommends targeted, participatory policies supported by capacity building, needs-based budgeting, and increased transparency to promote sustainable development and holistic community welfare.

**Keywords:** Policy Evaluation; Village Fund; Village Infrastructure; Community Welfare; Pesawaran Regency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembangunan infrastruktur desa dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat perdesaan. Namun, masih terdapat tantangan terkait efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa, seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn digunakan sebagai kerangka analisis, dengan dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, daya tanggap, dan keadilan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur dengan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta kurangnya pengawasan teknis dan pelatihan bagi aparat desa. **Kesimpulan:** Pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan regulasi dan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun perlu adanya perbaikan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan Dana Desa lebih tepat sasaran dan partisipatif, didukung dengan pelatihan aparatur, penganggaran berbasis kebutuhan, dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; Dana Desa; Infrastruktur Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Kabupaten Pesawaran

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan salah satu elemen penting dalam administrasi publik karena menjadi dasar dari seluruh proses penyelenggaraan negara. Menurut Mulyadi (2016:11), seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat—baik yang dijalankan oleh birokrasi, sektor swasta, maupun masyarakat umum—tidak terlepas dari kebijakan publik. Dalam hal ini, kebijakan publik dianalogikan sebagai otak dalam tubuh manusia yang mengatur jalannya seluruh fungsi dan aktivitas. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menjadi instrumen utama untuk mengatur hubungan nyata antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi titik awal dari pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, Muchlis (2015:81) menyatakan bahwa proses kebijakan publik merupakan serangkaian langkah dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai kegiatan. Artinya, kebijakan publik bukan hanya produk akhir berupa regulasi, tetapi juga mencakup proses yang kompleks dan dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi lokal (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, 2024). Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN sejak 2015. Nurdin (2017) mendefinisikan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah. Sehingga dana desa yang dikelola oleh pemerintah, diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat. Namun, meskipun anggaran Dana Desa terus meningkat, efektivitas penggunaannya masih

menjadi tantangan. Pada penelitian yang dilakukan Lang & Badenhoop (2025) menyatakan bahwa mereka menemukan hubungan erat antara profesionalisasi organisasi masyarakat sipil sebagai penyedia layanan yang bergantung pada pendanaan. Yang dimana ini menjadi hal penting bahwa dana desa juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, adapula peneliti yang menyatakan bahwa ketergantungan pada dana yang diberikan pemerintah mengakibatkan *gagging clauses* yang dimana pemerintah akan lebih memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan kesejahteraannya (Arvidson dkk, 2018). Ini menunjukkan dinamika yang sangat mirip dengan pelaksanaan dana desa—di mana birokrasi, kontrak, dan ketergantungan pada pemerintah lokal bisa mengurangi fokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui infrastruktur (Alexander et al., 1999).

Lalu, masih terjadi ketimpangan pembangunan antar desa, terutama dalam hal kualitas dan aksesibilitas infrastruktur. Beberapa faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa antara lain rendahnya kapasitas perangkat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta lemahnya pengawasan (KEMENDAGRI, 2019). Selain itu, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi persoalan administratif dan teknis yang berdampak pada kualitas output pembangunan.

Tujuan dari pembangunan infrastruktur desa, yaitu (Adisasmita, 2014):

1. Dalam jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Dalam jangka menengah, meningkatkan akses masyarakat miskin di desa terhadap infrastruktur dasar.

Pengelolaan pada dasarnya mencakup pengendalian dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tertentu dalam pekerjaan (Bastian, 2015). Lalu, Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur pembangunan berbasis kebutuhan lokal dengan dukungan Dana Desa dari APBN. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Namun, meskipun alokasi Dana Desa terus meningkat, efektivitas dan kualitas infrastruktur yang dibangun seringkali belum optimal. Laporan dari Bappenas menunjukkan penurunan kualitas infrastruktur desa meski anggaran meningkat. Hanya sebagian kecil proyek yang memenuhi standar teknis dan operasional. Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung menjadi fokus penelitian karena memiliki 144 desa dengan potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun masih mengalami ketimpangan infrastruktur antar desa. Tantangan lain yang dihadapi termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta pengawasan yang kurang efektif.

Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan alokasi Dana Desa yang signifikan, namun belum dibarengi dengan pengelolaan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa di Kabupaten Pesawaran, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta distribusi dan pemanfaatan dana di tiap kecamatan.

Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran menjadi tantangan yang kompleks mengingat keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur. Berdasarkan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di banyak desa masih terbatas, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel. Selain itu, keterbatasan kapasitas perangkat desa juga dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana, yang seringkali tidak sepenuhnya transparan (Afifah

& Mustofa, 2023). Peneliti lain juga menemukan bahwa kurangnya pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa berakibat pada lemahnya efektivitas pembangunan infrastruktur di Luwu Utara. Infrastruktur yang dibangun melalui Dana Desa, seperti jalan desa dan jembatan, kadang tidak dikelola dengan baik atau tidak sesuai standar yang ditetapkan. Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya perbaikan pada aspek tata kelola yang lebih baik, agar Dana Desa dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian mereka juga menyarankan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa (Irmansyah dkk., 2021).

Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa menjadi salah satu aspek krusial yang sering diabaikan. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat proses pengawasan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek yang didanai oleh Dana Desa. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan dana yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat desa, yang sekaligus dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana (Purnawan, 2020).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa di Kabupaten Pesawaran. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Dana Desa efektif dalam memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa sejak tahun 2015, efektivitas implementasinya masih belum optimal. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada besaran alokasi Dana Desa dan tingkat penyerapan anggaran, namun belum banyak yang melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kualitas hasil pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa serta keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Selain itu, sebagian besar studi terdahulu masih bersifat kuantitatif dan berorientasi makro, sementara konteks lokal seperti di Kabupaten Pesawaran yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, justru memerlukan pendekatan kualitatif dan evaluatif yang lebih mendalam untuk memahami tantangan implementasi di tingkat desa.

Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk:

1. **Melakukan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa secara menyeluruh**, tidak hanya dari sisi input dan output, tetapi juga dari sisi outcome yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual lokal** seperti kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan pelaporan yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan kebijakan.
3. **Menganalisis implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Pesawaran**, karena daerah ini belum banyak dikaji secara akademik meskipun memiliki alokasi Dana Desa yang signifikan dan beragam tantangan pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan pembangunan desa berbasis evaluasi menyeluruh.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan dan dampak dari kebijakan Dana Desa di berbagai daerah. Heru Purnawan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya kompetensi aparat desa, penunjukan tim pelaksana berdasarkan kedekatan personal, keterlambatan pencairan dana, serta adanya intervensi pihak luar. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme pelaksana, namun belum mengevaluasi secara langsung efektivitas kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian penulis.

Sementara itu, Afriyana dkk. (2023) dalam penelitiannya *“Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten/Kota NTB (2016-2021)”* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur seperti listrik dan air bersih berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, namun infrastruktur jalan dan pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini lebih menekankan aspek ekonomi inklusif secara makro, berbeda dengan fokus penelitian penulis yang mengevaluasi kebijakan infrastruktur Dana Desa dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui pendekatan evaluatif dan kualitatif.

(Zitri dkk. (2020) dalam penelitian berjudul *“Evaluasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”* dengan studi kasus di Desa Poto Tano, Sumbawa Barat, menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu temuan penting adalah dominasi alokasi dana untuk pembangunan fisik ketimbang program pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan evaluatif terhadap efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur dan tantangan-tantangan spesifik di Kabupaten Pesawaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, (Rozandi & Digidowiseiso (2021) dalam penelitiannya *“Evaluasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang, Kalimantan Barat)”* menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Ia menemukan bahwa Dana Desa telah berkontribusi terhadap peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Meskipun demikian, fokus penelitian ini lebih kepada peningkatan klasifikasi status desa, sementara penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada evaluasi pembangunan infrastruktur secara substansial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, Purnawan dkk. (2022) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Taba Air Pauh, Kabupaten Kepahiang. Dengan metode deskriptif kualitatif, mereka menemukan bahwa meskipun kebijakan ini didukung penuh oleh pemerintah desa, terdapat beberapa kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan terjadinya kerumunan saat pencairan di bank. Fokus penelitian ini lebih pada evaluasi teknis pelaksanaan BLT-DD, sementara penelitian penulis menekankan evaluasi kebijakan infrastruktur dan keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan keterbaruan ilmiah dalam evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Pesawaran. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi—misalnya hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan (Purnawan, 2020; Purnawan et al., 2022), dominasi pembangunan fisik tanpa pemberdayaan (Zitri et al., 2020), atau peningkatan status IDM (Rozandi, 2021)—penelitian ini secara komprehensif mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan pendekatan evaluatif terhadap capaian kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian di Kabupaten Pesawaran, yang belum banyak mendapat sorotan dalam studi sejenis, memperkuat kontribusi penelitian ini dalam memperluas cakupan literatur kebijakan Dana Desa dalam konteks wilayah Sumatera. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Chazali H. Situmorang, penelitian ini juga menawarkan pendekatan teoritis yang jarang digunakan dalam evaluasi kebijakan Dana Desa.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa melalui pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran, dengan menyoroti sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, guna memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pembangunan desa ke depan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada 6 orang informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa, kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kepala seksi pemerintahan desa, kepala desa, ketua BPD, dan aparatur desa yang dianggap mengetahui serta terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dana desa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini.

Lalu, Fernandes Simangunsong (2017) menambahkan bahwa analisis data sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam bidang pemerintahan. Dalam konteks ini, model Miles dan Huberman memungkinkan analisis data dimulai sejak tahap pengumpulan data, bukan hanya setelah data terkumpul secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan secara paralel seiring dengan pengumpulan data dari wawancara, memungkinkan peneliti untuk segera menemukan pola-pola penting dan tema-tema relevan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung**

Kebijakan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung,

dilaksanakan melalui alokasi Dana Desa (DD) yang dicanangkan pemerintah pusat sejak 2015. Dana Desa ini merupakan salah satu bentuk perhatian negara terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengimplementasikan kebijakan ini dengan menitikberatkan pada pembangunan fisik seperti jalan desa, jembatan, drainase, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Program ini diarahkan untuk membuka aksesibilitas, mendukung produktivitas ekonomi masyarakat, dan mempercepat pembangunan wilayah tertinggal. Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, perencanaan yang matang, serta pengawasan dari berbagai pihak agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan transparan. Lalu, pada penelitian ini akan dibahas sesuai dimensi yang telah diberikan oleh Dunn (2016), sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di berbagai dusun secara langsung meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Jalan yang sebelumnya rusak atau belum tersedia kini diperbaiki melalui rabat beton, sementara saluran air diperbaiki dengan gorong-gorong beton. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut efektif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa.

### **2. Efisiensi**

Penggunaan dana yang bervariasi dan terperinci sesuai panjang dan jenis pekerjaan menunjukkan adanya efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Proyek seperti gorong-gorong dilakukan dalam ukuran kecil tetapi menyebar di berbagai titik, yang menunjukkan efisiensi skala mikro demi menjangkau kebutuhan warga secara merata.

### **3. Kecukupan**

Meski banyak titik pembangunan yang dilakukan, namun anggaran yang terbatas membuat beberapa kebutuhan lainnya kemungkinan masih belum terpenuhi, terutama di dusun yang tidak tercantum dalam tabel. Ini menunjukkan bahwa kecukupan anggaran masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat.

### **4. Perataan**

Pembangunan memang mencakup beberapa dusun (Bawang Induk, Mulyobakti, Purworejo, dan Mulyosari), namun distribusinya belum sepenuhnya merata karena ada fokus besar di Dusun Mulyosari (tercatat 6 dari 9 kegiatan di tabel). Ini menunjukkan bahwa perataan pembangunan masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan lebih menyeluruh.

### **5. Responsivitas**

Adanya kegiatan seperti pembukaan jalan dan pembangunan gorong-gorong menunjukkan bahwa pemerintah desa cukup responsif terhadap aspirasi warga, khususnya terkait infrastruktur penunjang transportasi dan pengairan. Kegiatan ini mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

### **6. Ketepatan**

Pembangunan dilakukan pada titik-titik vital seperti jalan penghubung antar dusun dan saluran air. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan melalui Dana Desa telah tepat sasaran dan diarahkan untuk mendukung produktivitas serta kesejahteraan warga desa.

## **3.2. Faktor-faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pertama, dukungan

pemerintah menjadi salah satu kekuatan utama. Pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten secara aktif membimbing dan mengawasi jalannya pembangunan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, misalnya, memastikan bahwa setiap desa memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan pendampingan teknis agar pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi. Kedua, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Masyarakat ikut serta dalam musyawarah desa untuk menentukan proyek prioritas, bahkan banyak yang terlibat langsung sebagai tenaga kerja maupun pengawas, menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilakukan.

Selain itu, ketersediaan sumber daya alam lokal seperti pasir dan batu kali turut mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur. Material ini dapat diperoleh dengan mudah di lingkungan sekitar, sehingga menghemat biaya transportasi dan mempercepat proses pelaksanaan proyek. Faktor pendukung lainnya adalah adanya sinergi yang baik antara pemerintah desa dan lembaga pendamping, seperti tenaga ahli, LSM, dan akademisi. Pendampingan yang diberikan meliputi tahap perencanaan hingga evaluasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan menjamin agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Desa juga menghadapi berbagai faktor penghambat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak perangkat desa yang belum memahami aspek teknis pengelolaan proyek maupun administrasi keuangan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada keterlambatan laporan dan lemahnya akuntabilitas. Selain itu, kondisi geografis Kecamatan Punduh Pidada yang terdiri atas wilayah perbukitan dan pesisir turut menyulitkan distribusi material ke lokasi pembangunan. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan memperlambat penyelesaian proyek.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur skala besar. Meskipun Dana Desa cukup membantu untuk proyek kecil dan menengah, namun tidak cukup untuk membiayai proyek besar seperti jembatan atau jalan penghubung antar desa, sehingga desa perlu mencari sumber pendanaan tambahan dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Terakhir, minimnya pengawasan juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Pengawasan yang lemah memungkinkan terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk mark-up harga bahan bangunan maupun penggunaan material yang tidak sesuai standar, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan kebijakan ini, tantangan dalam bentuk hambatan teknis, geografis, dan kelembagaan tetap perlu menjadi perhatian agar pembangunan infrastruktur desa benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.3. Upaya Yang Telah Dan Akan Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Untuk Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Secara Berkelanjutan**

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari penggunaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Punduh Pidada. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan rutin. Kegiatan ini menyasar kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dana, transparansi anggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur juga terus dioptimalkan. DPMD bekerja sama dengan Inspektorat Daerah serta tenaga pendamping desa untuk melakukan monitoring berkala dan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan agar akuntabilitas proyek dapat lebih terjaga. Upaya lain yang juga ditekankan adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui dorongan agar masyarakat aktif terlibat dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan pelibatan dalam kegiatan padat karya yang dibiayai oleh Dana Desa, proses pembangunan tidak hanya menjadi lebih inklusif tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga desa.

Di sisi lain, guna mengatasi kendala teknis seperti kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan bahan material, DPMD mendorong pemanfaatan teknologi serta inovasi dalam pembangunan. Penggunaan bahan lokal yang mudah dijangkau namun tetap memenuhi standar kualitas menjadi salah satu alternatif yang didorong untuk mengurangi hambatan distribusi. Pendampingan teknis dari para ahli juga disediakan guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Melalui berbagai langkah tersebut, DPMD Kabupaten Pesawaran menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengatasi hambatan yang ada, tetapi juga mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Efektivitas penggunaan Dana Desa yang terus ditingkatkan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas infrastruktur dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Pesawaran menggunakan Dana Desa berjalan cukup efektif, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Afifah (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan fisik melalui Dana Desa secara umum berjalan sesuai rencana. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan cukup tinggi, berbeda dari temuan Afifah yang menyebutkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas pelibatan masyarakat melalui forum seperti Musrenbang Desa di Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program lebih optimal pada desa-desa yang memiliki perangkat desa dengan kompetensi dan pengetahuan teknis yang baik. Hal ini menguatkan hasil penelitian Arifin (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa. Di lokasi penelitian ini, desa dengan sumber daya manusia yang lebih siap dan aktif umumnya mampu menyerap anggaran secara maksimal dan menyelesaikan pembangunan sesuai target.

Namun demikian, dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas, penelitian ini menemukan masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2022) yang mengidentifikasi transparansi dan akuntabilitas sebagai tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun pelaporan dilakukan sesuai prosedur, informasi tersebut belum disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan.

Dari aspek pengawasan, penelitian ini menunjukkan adanya pengawasan internal oleh BPD dan eksternal oleh kecamatan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan sumber daya. Temuan ini mirip dengan yang diungkapkan oleh Indra (2021) bahwa fungsi pengawasan

Dana Desa masih lemah akibat kurangnya dukungan teknis dan rendahnya kapasitas lembaga pengawas di tingkat desa. Ini mengindikasikan bahwa struktur pengawasan formal saja tidak cukup tanpa dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaksana pengawasan.

Hasil penelitian ini juga menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek pemeliharaan pasca-pembangunan. Hal ini melengkapi temuan Kurniawan (2019) yang menyebutkan bahwa sebagian besar proyek Dana Desa tidak dilengkapi dengan rencana pemeliharaan jangka panjang, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam waktu singkat. Di Kabupaten Pesawaran, sebagian besar masyarakat belum secara aktif dilibatkan dalam program pemeliharaan, sehingga diperlukan pendekatan partisipatif lanjutan.

Dengan demikian, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat sejumlah temuan sebelumnya terutama dalam aspek efektivitas pelaksanaan dan tantangan akuntabilitas. Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dalam menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat lebih optimal bila didukung oleh forum diskusi desa yang aktif serta kepemimpinan desa yang terbuka. Keseluruhan temuan ini memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa di Kabupaten Pesawaran sudah berada pada jalur yang benar, meski masih membutuhkan penguatan di aspek akuntabilitas, pengawasan, dan keberlanjutan pembangunan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur Dana Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kapasitas aparatur desa, ketidaksesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat, serta kesenjangan pemerataan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan sudah tepat, pelaksanaannya perlu ditingkatkan dari sisi teknis, perencanaan partisipatif, serta pengawasan yang lebih kuat.

Faktor pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, dukungan regulasi dari DPMD, serta potensi sumber daya alam lokal telah menjadi penggerak utama dalam menunjang kelancaran pembangunan. Di sisi lain, faktor penghambat seperti kondisi geografis sulit, kurangnya SDM, dan minimnya pengawasan menjadi hambatan yang harus segera diatasi agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan.

Upaya-upaya strategis yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), seperti pelatihan, pendampingan, sinergi dengan pihak ketiga, dan adopsi teknologi, menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan desa. Pendekatan kolaboratif ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa di Kabupaten Pesawaran telah berada pada jalur yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek efisiensi, pemerataan, pengawasan, dan akuntabilitas agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni fokus penelitian terbatas pada aspek pembangunan infrastruktur, sehingga belum mengeksplorasi secara menyeluruh dimensi lain dari Dana Desa seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah kajian, mencakup beberapa kecamatan atau kabupaten lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Dana Desa.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam tersusunnya penelitian ini:

Pertama, kepada Dr. Rosmery Elsy, SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran, keahlian, dan dedikasi telah membimbing sejak tahap perancangan hingga penyusunan naskah akhir. Bimbingan Ibu sangat membantu dalam memperjelas kerangka pemikiran, metodologi, dan analisis data.

Kedua, kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, khususnya Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Staf Pengelola Dana Desa, atas kerjasama dan kemudahan akses data yang sangat memadai. Pendampingan teknis dan informasi yang diberikan menjadi dasar kuat bagi kelancaran penelitian ini.

Ketiga, kepada para informan—meliputi kepala desa, ketua BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa Bawang—yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi jujur selama wawancara dan diskusi lapangan. Tanpa keterbukaan dan partisipasi aktif Bapak/Ibu, penelitian ini tidak akan mencapai kedalaman analisis yang diharapkan.

Keempat, kepada tenaga pendamping desa, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang telah memberikan wawasan, saran, serta dukungan lapangan, khususnya dalam aspek teknis pembangunan dan pemetaan kebutuhan infrastruktur.

Kelima, kepada keluarga tercinta—Papa, Mama, dan adik—atas doa, cinta, dan motivasi tiada henti, yang membuat peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat desa di masa yang akan datang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Graha Ilmu.  
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK899/pertumbuhan-wilayah-and-wilayah-pertumbuhan>
- Afifah, F. A. N., & Mustofa, A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semabung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 9(1).  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/28508>
- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., Harsono, I., & Kunci, K. (2023). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021* (Vol. 5, Issue 1). <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/70>
- Alexander, J., Nank, R., & Stivers, C. (1999). Implications of welfare reform: Do nonprofit survival strategies threaten civil society? *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 28(4), 452–475.  
[https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/urban\\_facpub/article/1101/typ](https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/urban_facpub/article/1101/typ)

[e/native/&path\\_info=](#)

- Arvidson, M., Johansson, H., & Scaramuzzino, R. (2018). Advocacy compromised: How financial, organizational and institutional factors shape advocacy strategies of civil society organizations. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 29(4), 844–856. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9900-y>
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-vqLFRGpQ71>
- Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis*. Routledge, Taylor & Francis Group. [https://elearning-facdr.univ-annaba.dz/pluginfile.php/17358/mod\\_resource/content/0/Policy%20Analysis.pdf](https://elearning-facdr.univ-annaba.dz/pluginfile.php/17358/mod_resource/content/0/Policy%20Analysis.pdf)
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- KEMENDAGRI. (2019). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019*.
- Lang, C., & Badenhop, E. (2025). Civil society organisations and the local politics of migration: How funding contexts matter. *Comparative Migration Studies*, 13(3). <https://doi.org/10.1186/s40878-024-00420-0>
- Muchlis Hamdi ; Risman Sikumbang. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, Dan Partisipasi / Muchlis Hamdi ; Editor: Risman Sikumbang*. 2015. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16387>
- Mulyadi, D. (2016). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik* (Vol. 17). [https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show\\_detail&id=12287&keywords=](https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=12287&keywords=)
- Nurdin, I. (2017). *Etika pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. <http://eprints.ipdn.ac.id/42/>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1). <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/1235/717>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 407–416. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA SENGKUBANG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR PROVINSI KALIMATAN BARAT). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1). <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/1036>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. [https://www.researchgate.net/publication/325120254\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Pemerintahan](https://www.researchgate.net/publication/325120254_Metodologi_Penelitian_Pemerintahan)
- Undang-undang Nomoe 3 Tahun 2024. (2024).
- Zitri, I., Rifaid, & Lestanata, Y. (2020). IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2). <https://journal.unpacti.ac.id/JGLP/article/view/60>